

Matrik Gender Analysis Pathway (GAP)

SKPD : Dinas Perkebunan
TAHUN ANGGARAN : 2026

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / (Indikator/Tujuan)	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana ke Depan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Baseline)	Indikator Kinerja
PROGRAM : PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN KEGIATAN : Penyerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota SUB KEGIATAN : Pembinaan dan Penguasaan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian TUJUAN : Meningkatkan kesejahteraan pekabun melalui penerapan prinsip pembangunan perkebunan yang berkelanjutan	Dalam pembangunan sektor perkebunan, laki-laki dan perempuan memiliki peran penting dalam pengelolaan usaha perkebunan, baik sebagai pekabun, pengelola usaha, maupun anggota kelompok tani. Namun demikian, keterlibatan perempuan dalam kegiatan pembinaan, pengawasan usaha perkebunan, serta forum pengambilan keputusan seperti rapat monitoring dan evaluasi, forum kemitraan, maupun rapat penetapan harga TBS masih relatif lebih rendah dibandingkan laki-laki. Peserta kegiatan pembinaan dan rapat koordinasi terkait pembinaan usaha perkebunan maupun TBS tahun 2025 81,01% laki-laki dan 18,99% perempuan. Selain itu, dalam upaya meningkatkan tata kelola usaha perkebunan yang berkelanjutan, pemerintah juga mendorong penerapan standar Indonesia Sustainable Palm Oil bagi pekabun. Penerapan standar ini bertujuan untuk meningkatkan praktik budidaya yang baik, kapabilitas terhadap peraturan perundang-undangan, perlindungan lingkungan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing komoditas kelapa sawit. Tahun 2026 telah dilaksanakan FGD penyelenggaraan ISPO Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan bagian dari pembinaan dan pendampingan ISPO. Dengan Jumlah peserta 84% laki-laki dan 16% perempuan. Namun demikian, masih banyak pekabun yang menghadapi kendala dalam memahami dan memenuhi persyaratan sertifikasi ISPO, baik terkait aspek administratif, kelembagaan pekabun, maupun penerapan praktik perkebunan berkelanjutan. Kondisi ini memerlukan upaya pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan agar pekabun dapat meningkatkan kapasitas dan kesiapan dalam menerapkan prinsip dan kriteria ISPO. Dalam konteks gender, perempuan yang terlibat dalam usaha perkebunan juga memiliki peran dalam kegiatan budidaya, pengelolaan hasil, serta pengelolaan usaha keluarga. Namun akses perempuan terhadap informasi terkait standar keberlanjutan, pembinaan teknis, serta forum pengambilan keputusan dalam usaha perkebunan masih relatif terbatas. Oleh karena itu, kegiatan pembinaan dan pengawasan penerapan standar usaha perkebunan, termasuk pendampingan ISPO bagi pekabun, perlu dilaksanakan secara inklusif dengan memberikan kesempatan yang setara bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh informasi, meningkatkan kapasitas, serta berpartisipasi dalam pengembangan usaha perkebunan yang berkelanjutan. Jumlah perusahaan perkebunan swasta di Kalimantan Timur sejumlah 279 yang mendapatkan sertifikat ISPO 142 pekabun usaha. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, partisipasi, serta kapasitas pekabun laki-laki dan perempuan dalam penerapan standar usaha perkebunan dan sertifikasi ISPO, sehingga mendukung pengelolaan usaha perkebunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekabun.	Masih terdapat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam hal: Akses terhadap informasi terkait regulasi usaha perkebunan, kemitraan, penetapan harga TBS, dan standar keberlanjutan. Partisipasi perempuan dalam forum pembinaan, rapat monitoring dan evaluasi, serta kegiatan pendampingan usaha perkebunan. Kontrol dalam pengambilan keputusan pada kelembagaan kelompok tani maupun forum resmi usaha perkebunan. Manfaat dari kegiatan pembinaan dan pengawasan yang belum sepenuhnya dirasakan secara merata.	1. Peran domestik perempuan yang membatasi waktu untuk mengikuti kegiatan pembinaan atau rapat. 2. Ketidaktahuan perempuan dalam kepemilikan kelompok tani masih rendah. 3. Tingkat pemahaman terhadap regulasi usaha perkebunan dan standar keberlanjutan masih terbatas.	1. Kegiatan sosialisasi dan pembinaan yang belum sepenuhnya mendorong keterlibatan perempuan. 2. Forum resmi seperti rapat penetapan harga TBS masih didominasi oleh laki-laki. 3. Akses informasi dan jaringan usaha yang lebih banyak dijangkau oleh laki-laki.	Meningkatnya jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit, terutama kebun sawit rakyat yang memperoleh sertifikat pengelolaan kebun sawit berkelanjutan seperti ISPO/RSPO. Peningkatan ini berarti semakin banyak perusahaan kebun kelapa sawit yang menerapkan prinsip pembangunan perkebunan yang berkelanjutan dalam kegiatannya	1. Rapat Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Usaha Perkebunan 2. Fasilitas Pembinaan dan Peningkatan Kemitraan 3. Rapat Penetapan Harga TBS 4. Pembinaan dan Pendampingan ISPO Pekabun Masukan : Rp. 349,341,732 Keuaran : 1. Terlaksananya rapat monitoring dan evaluasi yang melibatkan peserta laki-laki dan perempuan 2. Terlaksananya pembinaan kemitraan antara perusahaan dan pekabun 3. Terlaksananya rapat penetapan harga TBS dengan partisipasi perwakilan pekabun 4. Terlaksananya pembinaan penerapan standar Indonesia Sustainable Palm Oil bagi pekabun Hasil : 1. Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam forum evaluasi pembangunan usaha perkebunan/ Terwujudnya hubungan kemitraan yang lebih harmonis antara perusahaan perkebunan dan pekabun. 2. Terwujudnya kemitraan usaha yang lebih inklusif 3. Meningkatnya transparansi dan pemahaman mekanisme harga TBS 4. Meningkatnya kapasitas pekabun laki-laki dan perempuan dalam penerapan standar perkebunan berkelanjutan	Dalam pembangunan sektor perkebunan, laki-laki dan perempuan memiliki peran penting dalam pengelolaan usaha perkebunan, baik sebagai pekabun, pengelola usaha, maupun anggota kelompok tani. Namun demikian, keterlibatan perempuan dalam kegiatan pembinaan, pengawasan usaha perkebunan, serta forum pengambilan keputusan seperti rapat monitoring dan evaluasi, forum kemitraan, maupun rapat penetapan harga TBS masih relatif lebih rendah dibandingkan laki-laki. Peserta kegiatan pembinaan dan rapat koordinasi terkait pembinaan usaha perkebunan maupun TBS tahun 2025 81,01% laki-laki dan 18,99% perempuan. Selain itu, dalam upaya meningkatkan tata kelola usaha perkebunan yang berkelanjutan, pemerintah juga mendorong penerapan standar Indonesia Sustainable Palm Oil bagi pekabun. Penerapan standar ini bertujuan untuk meningkatkan praktik budidaya yang baik, kapabilitas terhadap peraturan perundang-undangan, perlindungan lingkungan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing komoditas kelapa sawit. Tahun 2026 telah dilaksanakan FGD penyelenggaraan ISPO Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan bagian dari pembinaan dan pendampingan ISPO. Dengan Jumlah peserta 84% laki-laki dan 16% perempuan. Namun demikian, masih banyak pekabun yang menghadapi kendala dalam memahami dan memenuhi persyaratan sertifikasi ISPO, baik terkait aspek administratif, kelembagaan pekabun, maupun penerapan praktik perkebunan berkelanjutan. Kondisi ini memerlukan upaya pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan agar pekabun dapat meningkatkan kapasitas dan kesiapan dalam menerapkan prinsip dan kriteria ISPO. Dalam konteks gender, perempuan yang terlibat dalam usaha perkebunan juga memiliki peran dalam kegiatan budidaya, pengelolaan hasil, serta pengelolaan usaha keluarga. Namun akses perempuan terhadap informasi terkait standar keberlanjutan, pembinaan teknis, serta forum pengambilan keputusan dalam usaha perkebunan masih relatif terbatas. Oleh karena itu, kegiatan pembinaan dan pengawasan penerapan standar usaha perkebunan, termasuk pendampingan ISPO bagi pekabun, perlu dilaksanakan secara inklusif dengan memberikan kesempatan yang setara bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh informasi, meningkatkan kapasitas, serta berpartisipasi dalam pengembangan usaha perkebunan yang berkelanjutan. Jumlah perusahaan perkebunan swasta di Kalimantan Timur sejumlah 279 yang mendapatkan sertifikat ISPO 142 pekabun usaha. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, partisipasi, serta kapasitas pekabun laki-laki dan perempuan dalam penerapan standar usaha perkebunan dan sertifikasi ISPO, sehingga mendukung pengelolaan usaha perkebunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekabun.	Output : 1. Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi Outcome : 1. Persentase perkebunan besar bertani usaha yang terbiasa dan terawasi 2. Persentase Petaku Usaha Perkebunan yang Bersertifikasi Berkelanjutan Indikator Kinerja : Jumlah tdn Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi (Laporan) Target 1 Laporan

Samarinda, 30 Maret 2026
Pit. Kepala Dinas

Ahmad Muzakki, S.T., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197510012001121003